



## **JARINGAN DAMAI PAPUA** *(Papua Peace Network)*

Alamat : Jalan Yakonde 9 -12, Abepura Jayapura 99351 Papua  
E-mail : papuapeace09@yahoo.com

---

### **PERNYATAAN PERS**

#### **JARINGAN DAMAI PAPUA (JDP) TIDAK MENGURUS UP4B**

Sejumlah pihak di Tanah Papua berpendapat bahwa Jaringan Damai Papua (JDP) menggadaikan Dialog Jakarta-Papua dengan mendukung Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). Pihak lain menyebarkan isu bahwa JDP telah meninggalkan kampanye Dialog Jakarta-Papua dan mendukung komunikasi konstruktif. Berkaitan dengan munculnya pandangan-pandangan ini, JDP merasa perlu untuk memberikan klarifikasi.

**Pertama**, perlu diketahui bahwa pembentukan UP4B adalah program Pemerintah Pusat. Pemerintahlah yang mau membentuk UP4B, bukan JDP. Maka pihak yang berwenang untuk menjelaskan tentang UP4B adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat. Masyarakat perlu ketahui bahwa UP4B bukanlah program JDP. Pembentukan UP4B bukanlah hasil perjuangan dan pekerjaan JDP. JDP tidak mengurus UP4B. UP4B merupakan urusan pemerintah, bukan JDP. Oleh sebab itu, JDP tidak mempunyai wewenang untuk menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan UP4B. Kita semua menunggu penjelasan tentang UP4B dari pemerintah.

**Kedua**, Pembentukan UP4B tidak tergantung dari ada tidaknya dukungan dari JDP. Sekali Pemerintah membentuk UP4B, pemerintah akan merealisasikannya, entah dengan atau tanpa dukungan dari JDP, karena ini programnya.

**Ketiga**, rakyat Papua perlu ketahui bahwa sejak dari pembentukannya, JDP bekerja untuk mencapai satu target saja yakni terjadinya dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. Untuk mencapai target ini, JDP mempromosikan dialog Jakarta-Papua melalui konsultasi publik, seminar, diskusi formal dan informal. Setiap kesempatan yang ada dimanfaatkan oleh anggota JDP, baik secara pribadi maupun secara bersama, untuk berupaya menciptakan kesempatan dan membuka peluang bagi terjadinya suatu Dialog Jakarta-Papua .

**Keempat**, JDP tidak pernah menggadaikan Dialog Jakarta-Papua, yang diperjuangkannya dengan susah payah, dengan pembentukan UP4B. Pemerintah pusatlah yang merencanakan tentang pembentukan UP4B melalui suatu Peraturan Presiden. Karena itu dibuatlah draft Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres). Dalam proses pembahasan Raperpres tersebut, anggota JDP dimintai pendapat. Karena JDP bekerja untuk menciptakan peluang bagi Dialog Jakarta-Papua, maka kesempatan itu dipakai untuk memberikan masukan tentang pentingnya Dialog Jakarta-Papua sebagai wadah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Papua. Tentu, pemerintah belum tentu menerima semua masukan dari JDP.

Dan JDP tidak mempunyai wewenang untuk memaksakan ide Dialog Jakarta-Papua dalam proses penyusunan Raperpres tersebut. JDP juga tidak mempunyai kuasa untuk mengubah isi Raperpres. Maka isi Raperpres tentang UP4B tidak tergantung pada pendapatnya JDP. Semuanya itu sangat tergantung pada pihak yang menyusun Raperpres dan terutama pada Presiden karena dialah yang akan menandatangani.

Kemungkinan untuk perubahan Raperpres selalu terbuka. Bahkan satu menit sebelum penandatanganan pun, isi Raperpres masih bisa dirubah. Anggota JDP sudah memberikan pendapatnya. Tetapi hanya setelah Raperpres ini ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, barulah kita akan tahu sejauh mana pandangan dari JDP sudah atau tidak diakomodir dalam Perpres tentang UP4B. Maka JDP bukan menggadaikan Dialog Jakarta-Papua tetapi dengan motivasi yang murni berupaya memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menciptakan peluang bagi terjadinya Dialog Jakarta-Papua.

**Kelima**, mengenai Komunikasi Konstruktif. JDP tidak mempunyai wewenang untuk menjelaskannya, Karena JDP sendiri tidak mengetahui pengertian dari komunikasi konstruktif sebagaimana yang dipikirkan oleh pemerintah. JDP sendiri tidak mampu menjelaskan tentang komunikasi konstruktif karena JDP tidak tahu apakah Komunikasi konstruktif yang dipopulerkan oleh pemerintah sama dengan atau berbeda dari Dialog Jakarta-Papua yang dikampanyekan oleh JDP.

Maka Pemerintah merupakan pihak yang tepat untuk memberikan gambaran yang jelas tentang komunikasi konstruktif, sehingga rakyat bisa memahaminya.

Sedangkan JDP hanya bisa menjelaskan tentang Dialog Jakarta-Papua.

Abepura, 29 Maret 2011



**Pater DR. Nelas Tebay Pr**

Coordinator Jaringan Damai Papua (JDP)